



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD- 03/2015

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Panitia Khusus I telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 13 April 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Laporan Panitia Khusus I berupa Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa catatan strategis guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat kedepan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT.  
NOMOR : 121.04/Kep.DPRD-03/2015  
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWAN GUBERNUR JAWA BARAT AHKIR  
TAHUN ANGGARAN 2014.  
TANGGAL : 13 April 2015.

---

### **CATATAN STRATEGIS**

PEMBAHASAN LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2014 MERUPAKAN MOMEN STRATEGIS, MENINGAT INI MERUPAKAN MOMEN PERTAMA KALI BAGI DPRD PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN 2014-2019, DEMIKIAN JUGA BAGI PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT 2013-2018 SDR. AHMAD HERYAWAN, DAN SDR DEDI MIZWAR, YANG PERTAMA JUGA MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KAPASITAS SEBAGAI KEPALA DAERAH.

DALAM HAL INI DPRD MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS KINERJA SAUDARA YANG TELAH DILAKSANAKAN KHUSUSNYA DI TAHUN 2014. KURANG LEBIH ADA 42 PENGHARGAAN DALAM BERBAGAI BIDANG TELAH DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2014, ANTARA LAIN :

1. PENGHARGAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) CINTA KARYA BANGSA TAHUN 2013 DI JAKARTA 5 FEBRUARI 2014;
2. PENGHARGAAN MOST INSPIRATIONAL REGIONAL LEADER DARI MENS OBSESSION AWARDS 2014 DI JAKARTA, 15 FEBRUARI 2014;
3. ANUGERAH TEPPA (TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN) TINGKAT NASIONAL DENGAN PREDIKAT TERBAIK 2 DARI UKP 4 DI JAKARTA, 24 FEBRUARI 2014;
4. PENGHARGAAN GOVERNMENT AWARD KATEGORI PENDIDIKAN VERSI SINDO WEEKLY YANG DISERAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI, JAKARTA 19 MARET 2014;
5. PENGHARGAAN DEMOKRASI AWARD DARI HARIAN RAKYAT MERDEKA DI JAKARTA, 22 MARET 2014;
6. PENGHARGAAN PANGRIPTA NUSANTARA UTAMA TAHUN 2014, UNTUK RAIHAN KE 4 KALINYA SECARA BERTURUT-TURUT DARI BAPPENAS OLEH PRESIDEN RI DI JAKARTA, 30 APRIL 2014;
7. PENGHARGAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014 OLEH MEN PAN RB RI, UNTUK APLIKASI KM-NOL PRO POOR, OLEH WAPRES RI DI JAKARTA, 30 APRIL 2014;
8. PENGHARGAAN PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERBAIK 2014 DARI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DI JAKARTA, 26 MEI 2014;

9. PENGHARGAAN BHUMANDALA AWARD 2014 DARI KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, DI BANDUNG, 28 MEI 2014;
10. PENGHARGAAN LENCANA UTAMA ADHIBAKTI TANI DARI KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) NASIONAL, DI JAKARTA, 5 JUNI 2014;
11. PENGHARGAAN ENVIRONMENT AWARD KE-20 DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, DI JAKARTA, 5 JUNI 2014;
12. SIKOMPAK AWARD, PEMBINA TERBAIK NASIONAL KATEGORI BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DARI WAPRES RI, DI JAKARTA, 5 JUNI 2014;
13. PENGHARGAAN SATYALANCANA WIRAKARYA PEMBANGUNAN PERTANIAN DARI PRESIDEN PADA ACARA PEMBUKAAN PENAS XIV PETANI - NELAYAN DI MALANG, JATIM, 7 JUNI 2014;
14. MENERIMA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP), DI BANDUNG, 16 JUNI 2014;
15. PENGHARGAAN PEMRAKARSA PENGUATAN SIDA "PENINGKATAN NILAI TAMBAH PERIKANAN DARAT" OLEH MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI, DI JAKARTA, 11 AGUSTUS 2014;
16. PENGHARGAAN ANUBHAWA SASANA DARI MENTERI HUKUM DAN HAM KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT, DI BANDUNG, 19 AGUSTUS 2014;
17. ANUGERAH PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN KATAGORI PEMERINTAH PROVINSI PEDULI MUSEUM 2014 DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DI JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2014;
18. MENERIMA WTP KE TIGA KALINYA BERTURUT-TURUT ATAS KEBERHASILAN DALAM MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN TAHUN 2013 DENGAN CAPAIAN STANDAR TERTINGGI DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DISERAHKAN OLEH WAKIL PRESIDEN RI KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT, DI JAKARTA, 12 SEPTEMBER 2014;
19. MENERIMA PENGHARGAAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI YANG DISERAHKAN OLEH WAPRES RI DI JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2014;
20. PENGHARGAAN ADIUPAYA PURITAMA 2014 OLEH MENTERI PERUMAHAN RAKYAT DI JAKARTA, 25 SEPTEMBER 2014;
21. INVESTMENT AWARD PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN KEPADA PENYELENGGARA PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI, KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2014 DI JAKARTA, 7 OKTOBER 2014;
22. PENGHARGAAN FASILITATOR TERBAIK PENEGASAN BATAS DAERAH TAHUN 2014, YANG DISERAHKAN OLEH MENDAGRI RI, DI JAKARTA, 9 OKTOBER 2014;

23. PENGHARGAAN SEBAGAI PROVINSI DENGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN BERDAYA SAING TERBANYAK TAHUN 2014 YANG DISERAHKAN MENTERI PERTANIAN, JAKARTA, 10 OKTOBER 2014;
24. PENGHARGAAN ANUGERAH PEDULI PENDIDIKAN 2014 KATEGORI PROVINSI KABUPATEN/KOTA OLEH MENTERI PENDIDIKAN DI JAKARTA, 15 OKTOBER 2014;
25. SINDO TRIJAYA AWARD 2014 KATEGORI LOYAL CLIENT, 5 NOVEMBER 2014;
26. PENGHARGAAN ADHI KARYA PANGAN NUSANTARA DAN PENITI EMAS, OLEH PRESIDEN RI, DI SUBANG, 26 DESEMBER TAHUN 2014;
27. NATIONAL PROCUREMENT AWARD, 2014 DARI LKPP. KATEGORI KEPEMIMPINAN DALAM INFORMASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, OLEH MENTERI PPN/BAPPENAS, DI JAKARTA, 18 NOVEMBER 2014;
28. NATIONAL PROCUREMENT AWARD, 2014 DARI LKPP. KATEGORI PEMENUHAN TERHADAP STANDAR LPSE: 2014, OLEH KEPALA LKPPRI, DI JAKARTA, 18 NOVEMBER 2014;
29. NATIONAL PROCUREMENT AWARD, 2014 DARI LKPP. KATEGORI PERAN LPSE PROVINSI: 2014, OLEH KEPALA LKPPRI, DI JAKARTA, 18 NOVEMBER 2014;
30. PENGHARGAAN DALAM FESTIVAL SENI PERTUNJUKAN RAKYAT TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014, SEBAGAI JUARA PERTAMA DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DI PADANG, 25 MEI 2014;
31. PENGHARGAAN ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2014, SEBAGAI TERBAIK I KATEGORI ADVETORIAL TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI BANDUNG, 26 NOVEMBER 2014;
32. PENGHARGAAN ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2014, SEBAGAI TERBAIK I KATEGORI LAPORAN KERJA HUMAS PEMERINTAH TAHUN 2013 TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI BANDUNG, 26 NOVEMBER 2014;
33. PENGHARGAAN ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2014, SEBAGAI TERBAIK I KATEGORI MERCHANDISE UTAMA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI BANDUNG, 26 NOVEMBER 2014;
34. PENGHARGAAN ANUGERAH MEDIA HUMAS TAHUN 2014, SEBAGAI JUARA UMUM, DARI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI BANDUNG, TANGGAL 26 NOVEMBER 2014;
35. PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) KATAGORI UTAMA DARI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, TANGGAL 18 DESEMBER 2014;
36. PENGHARGAAN GOVERNMENT AWARD KATEGORI PENDIDIKAN VERSI SINDO WEEKLY YANG DISERAHKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, 19 MARET 2014;

37. PENGHARGAAN ANUGERAH PEDULI PENDIDIKAN 2014 KATEGORI PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG DISERAHKAN MENTERI PENDIDIKAN DI JAKARTA, 15 OKTOBER 2014;
38. PENGHARGAAN BHUMANDALA AWARD DARI KEPALA BADAN INFORMASI DI BANDUNG, 28 MEI 2014;
39. PENGANUGERAHAN BADEGA KI SUNDA KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT DI BANDUNG, 10 NOVEMBER 2014;
40. PENGHARGAAN MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA PADA PUNCAK ACARA HARI KESEHATAN NASIONAL YANG DISERAHKAN OLEH MENKO PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI JAKARTA, 27 NOVEMBER 2014;
41. PENGHARGAAN PERINGKAT PERTAMA LOMBA PENANAMAN SATU MILIAR POHON TINGKAT NASIONAL 2013. DISERAHKAN OLEH PRESIDEN RI DI WONOGIRI, JAWA TENGAH, 29 NOVEMBER 2014;
42. PENGHARGAAN MITRA STRATEGIS PEMILU DARI KPU, DI JAKARTA, 17 DESEMBER 2014;

UNTUK ITU DPRD MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS PRESTASI TERSEBUT. PENGHARGAAN INI TENTU MERUPAKAN PENGAKUAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS BEBERAPA KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI MASYARAKAT JAWA BARAT. NAMUN DEMIKIAN KIRANYA JAJARAN PEMPROV JABAR TERMASUK DPRD PROVINSI JAWA BARAT TIDAK BERPUAS DIRI, TETAPI YANG LEBIH PENTING BAGAIMANA MEMACU SEMANGAT UNTUK MENINGKATKAN LAGI KINERJA KEDEPAN, APALAGI ADA BEBERAPA AGENDA PEMBANGUNAN YANG BELUM TERSELESAIKAN.

SELANJUTNYA DPRD MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA SELURUH SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD), YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2014 BESERTA KELENGKAPAN DATA SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI SEBAGAI BAHAN UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA. NAMUN DEMIKIAN KIRANYA SETIAP OPD DAPAT MENYAJIKAN DATA YANG VALID DARI SUMBER DATA YANG DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN.

KEDEPAN, TIM PEMBAHASAN LKPJ PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, AGAR DAPAT MELENGKAPI LKPJ *TIDAK HANYA TERBATAS URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN, OUTPUT, AKAN TETAPI DICANTUMKAN PULA OUTCOME, BENEFITS DAN IMPACT. SELAIN ITU JUGA AGAR DILENGKAPI DENGAN SASARAN PELAKSANAAN, KEMAMPUAN TERHADAP SERAPAN TENAGA KERJA, PENGARUH TERHADAP PDRB DAN IPM, KHUSUSNYA INDEKS DAYA BELI MASYARAKAT.*

UNTUK MENGAWALI, KAMI MENCOBA UNTUK MENAMPILAKAN **CAPAIAN**  
**INDIKATOR MAKRO JAWA BARAT TAHUN 2014**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TH 2013	TAHUN 2014	
		CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA*	POIN	73,40	74,25 - 74,75	74,28
A. INDEKS PENDIDIKAN	POIN	82,31	84,65	83,36
B. INDEKS KESEHATAN	POIN	72,6	75,60	74,01
C. INDEKS DAYA BELI	POIN	64,89	64,0	65,47
2. JUMLAH PENDUDUK	JIWA	45.340.800	46.035.927	46.029.699
3. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP TOTAL PENDUDUK	PERSEN	9,61	7,80-6,80	9,18
4. PDRB	TRILIUN RUPIAH	1.070,18	n/a	1.387,28
5. LPE	PERSEN	6,06	5,9-6,5	5,07
6. INFLASI	PERSEN	9,15	6,0-7,0	6,16

\*) BPS ANGKA SANGAT SEMENTARA

SUMBER: BPS 2014

1. INDEKS PEMBANGUNAN

A. INDEKS PENDIDIKAN

DILIHAT DARI TABEL BAHWA TARGET UNTUK INDEKS PENDIDIKAN TIDAK TERCAPAI. INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2014 SEBENARNYA MENGALAMI PENINGKATAN YANG CUKUP BESAR JIKA DIBANDINGKAN CAPAIAN PADA TAHUN 2013. PADA TAHUN 2014 INDEKS PENDIDIKAN MENINGKAT CUKUP SIGNIFIKAN, YAKNI SEBESAR 1,05 POIN. HAL INI BISA DIKARENAKAN ANTARA LAIN ADANYA PROGRAM PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) YANG DILAKUKAN SETIAP TAHUN MESKIPUN MASIH DIBUTUHKAN KEBERLANJUTANNYA.

B. INDEKS KESEHATAN

INDEKS KESEHATAN TAHUN 2014 TIDAK TERCAPAI, PADAHAL SUDAH MENINGKAT SEBESAR 1,41 POIN DARI RAIHAN TAHUN 2013. PENINGKATAN TERSEBUT CUKUP FANTASTIS JIKA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA PENINGKATAN INDEKS KESEHATAN PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA.

TIDAK TERCAPAINYA TARGET INDEKS KESEHATAN TAHUN 2014, ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TIDAK TERSERAPNYA PENGUATAN PROGRAM BIDAN DESA, KURANGNYA PENGUATAN RUMAH SAKIT DAERAH DAN RUMAH SAKIT REGIONAL, BELUM OPTIMALNYA FUNGSI PUSKESMAS PONED, KURANGNYA PENGUATAN PONEK, SERTA BELUM MEMBUDAYANYA PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI MASYARAKAT.

C. INDEKS DAYA BELI

INDEKS DAYA BELI MENINGKAT SEBESAR 0,58 POIN DARI TAHUN 2013. PENINGKATAN TERSEBUT LEBIH TINGGI LAGI JIKA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET TAHUN 2014, YAKNI SEBESAR 1,47 POIN. INI SEBUAH PENINGKATAN YANG CUKUP MENGGEMBIRAKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. APALAGI JIKA DIBARENGI DENGAN PENINGKATAN MUTU SDM, INVESTASI YANG TINGGI, PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DI BERBAGAI BIDANG SEHINGGA AKAN MENINGKATKAN DAYA SAING UNTUK MENGHADAPI MEA.

2. JUMLAH PENDUDUK

PENGENDALIAN JUMLAH PENDUDUK CUKUP BERHASIL DILAKUKAN OLEH PEMPROV JABAR TERLIHAT DARI PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG TELAH DIPREDIKSI MASIH DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI TARGET.

3. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP TOTAL PENDUDUK

BEBERAPA PROGRAM PRO POOR SEPERTI PEMBUKAAN LAPANGAN KERJA, PEMBANGUNAN RUTILAHU PERLU MENDAPAT PERHATIAN.

4. PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

PDRB SEJATINYA MENGALAMI PENINGKATAN, NAMUN BELUM DAPAT DIRASAKAN SECARA BERKEADILAN OLEH KELOMPOK RENTAN.

5. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)

LPE TIDAK MENCAPAI TARGET, SALAH SATU SEBABNYA ADALAH TIDAK TERCAPAINYA NILAI INVESTASI DAN KENDALA BERBAGAI FAKTOR TERMASUK KONDISI POLITIK. PEMERINTAH PROVINSI HARUS MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI.

6. INFLASI

BERKAITAN DENGAN ANGKA INFLASI, AGAR BISA DIPERTAHANKAN SESUAI DENGAN MEKANISME EKONOMI YANG SELAMA INI BERJALAN DAN UNTUK MENCAPAI IDEAL MASIH MEMERLUKAN KERJA KERAS.

BERIKUT PEMBAHASAN LKPJ LEBIH LANJUT BERDASARKAN BIDANG :

**A. BIDANG PEMERINTAHAN**

DARI PEMBAHASAN BERSAMA MITRA TERKAIT DIPEROLEH GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. PADA UMUMNYA, KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI JAWA BARAT MENGALAMI PENINGKATAN TERBUKTI DENGAN BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA TERMASUK MAMPU MENGANTISIPASI DAN MERESPON PERUBAHAN YANG TERJADI. HAL INI PERLU TETAP DIPERTAHANKAN DAN DITINGKATKAN DI SEMUA OPD DI MASA YANG AKAN DATANG.
- B. MASIH ADANYA PERMASALAHAN PEMBEBASAN LAHAN TANAH MASYARAKAT SEHINGGA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHAMBAT, DIANTARANYA PENYELESAIAN MASALAH PEMBEBASAN TANAH DI KERTAJATI.

- C. PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BELUM DIUPAYAKAN SECARA OPTIMAL SEHINGGA REALISASINYA RELATIF RENDAH.
- D. MASIH LEMAHNYA SDM DI BIDANG HUKUM YANG MENANGANI PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
- E. PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR, PEMPROV MASIH MINIM DALAM MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI JAWA BARAT SERTA BELUM OPTIMALNYA PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN LINDUNG.
- F. PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI MASIH MINIM ANGGARAN MAUPUN SUMBERDAYA MANUSIANYA.
- G. PEMPROV BELUM OPTIMAL MENDORONG DESA DAN KELURAHAN DI JAWA BARAT UNTUK MENJADI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.
- H. MASIH BELUM OPTIMALNYA PENGAMANAN TERHADAP 4.559 LAHAN ASET, YANG SAAT INI BARU 1.247 LAHAN YANG SUDAH BERSERTIFIKAT ATAU SEKITAR 27%.
- I. MASIH KURANG SINERGI ANTAR OPD DALAM PENGAMANAN DAN PENERTIBAN ASET SEHINGGA KEAMANAN SECARA FISIK DAN ADMINISTRASI MASIH DIPERTANYAKAN.
- J. STANDAR HARGA BARANG DAN JASA YANG SUDAH DITETAPKAN TIDAK SESUAI DENGAN HARGA RIIL DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA SEHINGGA MENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN.
- K. GEDUNG KAMPUS II BANDIKLATDA SAAT INI BELUM MAMPU MEMENUHI KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
- L. MASIH BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM KEARSIPAN BAIK DI INTERNAL PROVINSI MAUPUN DENGAN KABUPATEN/KOTA.
- M. PEMBERIAN IZIN TERUTAMA BAGI PENANAM MODAL ASING MASIH KURANG MEMPERTIMBANGKAN KESEMPATAN BAGI TENAGA KERJA LOKAL, TERJAMINNYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR YANG ADA SERTA TERPELIHARANYA LINGKUNGAN SEKITAR.
- N. PERATURAN GUBERNUR YANG BERKAITAN DENGAN MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI UNTUK KOTA/KABUPATEN DIRASAKAN TERLALU BIROKRATIF SEHINGGA MENGHAMBAT REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM.
- O. MASIH RENDAHNYA KEMAMPUAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DALAM HAL PEMAHAMAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA.
- P. MASIH LEMAHNYA KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTAR OPD DALAM KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BERBUDAYA LINGKUNGAN, SEPERTI DALAM GERAKAN CITARUM BESTARI.
- Q. MASIH LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU).

- R. MASIH LEMAHNYA FUNGSI DAN PERAN BKPP DALAM MEMBANGUN KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTAR SEKTOR MAUPUN DENGAN KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN TEMATIK KEWILAYAHAN.
- S. MASIH TINGGINYA TINGKAT KERAWANAN SOSIAL YANG BERPOTENSI MENGGANGGU KAMTIBMAS DI JAWA BARAT.
- T. BANYAKNYA PRODUK PENYIARAN YANG KURANG SEHAT, CERDAS SEPERTI PORNOGRAFI, PORNOAKSI MAUPUN KEKERASAN. DIMANA PERAN DAN FUNGSI KPID BELUM MAKSIMAL.

## **B. BIDANG PEREKONOMIAN**

DALAM BIDANG PEREKONOMIAN, DARI PEMBAHASAN BERSAMA MITRA TERKAIT DIPEROLEH GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENGALAMI PERLAMBATAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA MENAKIBATKAN SEKTOR PRODUKSI, SEKTOR PERTANIAN, HOTEL DAN RESTORAN MENGALAMI PERLAMBATAN YAITU DENGAN LPE SEBESAR 5,07 % DIBANDINGKAN PADA PERIODE TAHUN 2013 SEBESAR 6,06 %.
2. BELUM OPTIMALNYA PEMBANGUNAN BIDANG PETERNAKAN, UNTUK MENYEDIAKAN KOMODITI PETERNAKAN PRODUKSI DAGING TAHUN 2014 SEBANYAK 647.178 TON, PRODUKSI SUSU TAHUN 2014 SEBANYAK 228.774 TON, DAN PRODUKSI TELUR TAHUN 2014 SEBANYAK 206.194 TON.
3. BELUM MAKSIMALNYA PENCAPAIAN TARGET DI RPJMD YAITU PROGRAM JAWA BARAT 1 JUTA SAPI DAN 10 JUTA DOMBA SEBAGAI TARGET PEMENUHAN SWASEMBADA PROTEIN HEWANI.
4. BELUM TERPENUHINYA PRODUKSI TERNAK UNTUK KEBUTUHAN DAGING DI JAWA BARAT.
5. MASIH TINGGINYA MUTASI SAPI PEDET PRODUKSI JAWA BARAT KE LUAR WILAYAH JAWA BARAT, YAITU PEDET SAPI PERAH SEBESAR 71,4 % DAN PEDET SAPI POTONG SEBESAR 59,1 %. TINGGINYA MUTASI SAPI PEDET TERSEBUT DIKARENAKAN DALAM KEGIATAN PEMBESARAN, TERKENDALA OLEH TERBATASNYA LAHAN DAN HIJAUAN, BESARNYA BIAYA OPERASIONAL PEMELIHARAAN DAN WAKTU YANG LAMA. TINGGINYA MUTASI SAPI PEDET PRODUKSI JAWA BARAT INI MENYEBABKAN PENINGKATAN POPULASI DAN AKSEPTOR IB TIDAK SIGNIFIKAN SETIAP TAHUNNYA.
6. MASIH LEMAHNYA PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT MELALUI EVENT DALAM DAN LUAR NEGERI, DIAKIBATKAN STRATEGI PROMOSI PARIWISATA YANG BELUM OPTIMAL.

7. KEGIATAN PENGADAAN MEDIA SOSIALISASI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JAWA BARAT TIDAK DILAKSANAKAN KARENA MEMERLUKAN TENAGA OPERATOR KHUSUS UNTUK MENGOPERASIKAN MEGATRON DAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DENGAN TUPOKSI DISPARBUD JABAR.
8. KEGIATAN PENYUSUNAN JUKLAK DAN JUKNIS PENCETAKAN 100 RIBU WIRUSAHA BARU JAWA BARAT, TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA TERBATASNYA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.
9. BELUM SELURUH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT MEMILIKI KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN YANG MEMADAI (SETINGKAT ESELON II) SEHINGGA PELAKSANAAN PROGRAM BELUM BERJALAN SECARA SINERGIS DAN OPTIMAL.
10. BELUM SEMUA KABUPATEN/KOTA MEMBENTUK DEWAN KETAHANAN PANGAN SEBAGAIMANA DI AMANATKAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN, SEMENTARA YANG SUDAH TERBENTUKPUN BELUM BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA.
11. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DI PPI CIKIDANG DAN PPI CISOLOK BELUM TERSELESAIKAN.
12. MASIH LEMAHNYA PRODUKSI IKAN TANGKAP KARENA NELAYAN KEKURANGAN FASILITAS.
13. KURANGNYA PEMAHAMAN SERTA PENGETAHUAN NELAYAN TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI DIKARENAKAN SEBAGIAN BESAR MERUPAKAN NELAYAN TRADISIONAL DENGAN KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA YANG RELATIF RENDAH.
14. BELUM PROPORSIONALNYA STRUKTUR ARMADA PENANGKAPAN IKAN, DIMANA SEKITAR 90% MASIH MERUPAKAN ARMADA PENANGKAPAN KECIL (<10GT).
15. ADANYA KETIMPANGAN PEMANFAATAN STOCK IKAN ANTARA KAWASAN PANTAI UTARA YANG SUDAH "OVER FISHING" DIBANDINGKAN DENGAN KAWASAN PANTAI SELATAN YANG PEMANFAATANNYA BELUM OPTIMAL, TERMASUK KAWASAN ZEE LAUT SELATAN YANG BELUM "TERJAMAH" PARA NELAYAN JAWA BARAT.
16. TERBATASNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA USAHA BUDIDAYA IKAN DAN PENANGKAPAN, SEPERTI JARINGAN IRIGASI DI TAMBAK MAUPUN SALURAN BUDIDAYA AIR TAWAR, PRASARANA TPI/PPI, SERTA SARANA PENANGKAPAN DAN BUDIDAYA IKAN DI LAUT.
17. MENURUNNYA KUALITAS EKOSISTEM SUMBERDAYA PERIKANAN. BAIK DIPERAIRAN TAWAR, KAWASAN PESISIR, MAUPUN KAWASAN PERAIRAN LAUT AKIBAT PENCEMARAN PERAIRAN OLEH LIMBAH INDUSTRI, KERUSAKAN HUTAN MANGROVE, KERUSAKAN TERUMBU KARANG, DLSB.

18. LEMAHNYA TINGKAT PENGUASAAN PASAR, MENCAKUP PENGUASAAN INFORMASI, SEGMENTASI PASAR, JENIS PRODUK DAN MUTU KOMODITAS PERIKANAN.
19. USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN MASIH DIANGGAP BERISIKO DAN KURANG MENGUNTUNGGAN, SEHINGGA KURANG MENDAPATKAN DUKUNGAN PERMODALAN USAHA YANG MEMADAI.
20. KURANG LENGKAPNYA FASILITAS PENUNJANG PRODUKSI YANG BISA DIJADIKAN UKURAN PENCAPAIAN PRODUKSI KETIKA TERJADI ANOMALI CUACA ATAU PENYAKIT HAMA TANAMAN.
21. KONVERSI LAHAN PERTANIAN KE INDUSTRI DAN PERUMAHAN MENINGKAT SEHINGGA LAHAN PERTANIAN SEMAKIN BERKURANG.
22. PENGARUH PENINGKATAN PRODUKSI TIDAK SEJALAN DENGAN INCOME PETANI, ANTARA LAIN KARENA MAHALNYA HARGA PUPUK SEDANGKAN HARGA JUAL PRODUK RENDAH.
23. MASIH BERULANGNYA KEGAGALAN PANEN SETIAP TAHUN, ANTARA LAIN KARENA KURANG OPTIMALNYA PENANGGULANGAN HAMA TERPADU DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.
24. PRODUKSI BENIH BERKUALITAS BELUM MEMADAI SEHINGGA TARGET TIDAK TERCAPAI.
25. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) YANG SANGAT MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN, YANG MENYEBABKAN BEBERAPA KOMODITAS MENGALAMI PENURUNAN HASIL.
26. MASIH LEMAHNYA FUNGSI DAN PERAN BAKORLUH DI SEMUA TINGKATAN.
27. LEMAHNYA AKSES PETANI TERHADAP SUMBER PERMODALAN/ PEMBIAYAAN USAHA DAN BELUM BERKEMBANGNYA KELEMBAGAAN DI TINGKAT PETANI.
28. TERDAPAT ANGGARAN YANG TIDAK TERSERAP, KARENA ADANYA KETERLAMBATAN PENUGASAN TENAGA FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SERTA KURANGNYA KESEMPATAN MENGIKUTI DIKLAT, SEMINAR, BIMTEK DLL.
29. MASIH KURANG TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TERUTAMA DI TINGKAT BP3K/BPP SEBAGAI LEMBAGA TERDEPAN DALAM PELAYANAN PENYULUHAN.
30. IPKINDO SEBAGAI ORGANISASI PROFESI PENYULUHAN KEHUTANAN MASIH PERLU PENGUATAN PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN DAN MASIH KURANG TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGEMBANGAN SENTRA PENYULUHAN KEHUTANAN PERDESAAN (SPKP).

31. BELUM ADA PENDATAAN YANG JELAS TERHADAP LAHAN-LAHAN IDEL BAIK PERKEBUNAN RAKYAT, SWASTA DAN PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEMANFAATAN UNTUK MENANGGULANGI KETERBATASAN LAHAN.
32. PROGRAM PROMOSI BAIK DILUAR NEGERI MAUPUN DALAM NEGERI TIDAK DILANJUTI DENGAN KESIAPAN PENINGKATAN PRODUKSI SEBALIKNYA TERJADI PENURUNAN PRODUKSI UNGGULAN YAITU TEH, KARET, TEBU, TEMBAKAU DAN KELAPA.
33. BELUM TERGAMBAR NILAI HITUNGAN EKONOMIS DARI PRODUK YG DIHASILKAN PROGRAM BINAAN PEMERINTAH DIBIDANG PERKEBUNAN SEHINGGA BELUM BISA MENARIK PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGEMBANGKAN JENIS TANAMAN YG DIPROGRAMKAN.
34. USAHA PERKEBUNAN RAKYAT PERIU ADA PENINGKATAN PERHATIAN DARI PROVINSI JAWA BARAT, SEHINGGA BISA SINERGIS DENGAN KEBUTUHAN PASAR YANG DAPAT MENGUNTUNGKAN PETANI PERKEBUNAN.
35. AKSES PASAR PERKEBUNAN DENGAN INFORMASI PASAR DAN MUSIM TANAM PERLU DIBUKA SELUAS-LUASNYA SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN DAYA TAWAR PETANI.
36. MENURUNNYA KUALLITAS SUMBER DAYA LAHAN KARENA BERBAGAI FAKTOR (ANOMALI IKLIM, EKSPLOITASI YANG BERLEBIHAN, TEKNIK BUDIDAYA YANG KURANG TEPAT) SERTA BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA (IRIGASI, JALAN PRODUKSI) MENYEBABKAN RENDAHNYA TINGKAT PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN.
37. MASIH BANYAKNYA DITEMUI PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BENIH TIDAK BERSERTIFIKAT YANG MERUGIKAN PETANI.
38. MASIH RENDAHNYA PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU HASIL OLEH PARA PELAKU USAHA PERKEBUNAN.
39. MASIH KURANGNYA DAYA SAING PRODUK PERKEBUNAN DI PASAR EKSPOR.
40. KEGIATAN PENCETAKAN 100 RIBU WIRAUSAHA BARU BELUM SESUAI DENGAN TARGET TAHUNAN, YAITU 3.000 ORANG/TAHUN, DIKARENAKAN ANGGARAN YANG TERSEDIA HANYA BISA MEMFASILITASI UNTUK 300 ORANG WIRAUSAHA BARU.
41. MASIH MINIMNYA ANGGARAN UNTUK KEGIATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU KUMKM DALAM BENTUK DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF MAUPUN DIKLAT MANAGERIAL DAN KEWIRAUSAHAAN, SEHINGGA HANYA MAMPU MEMFASILITASI BAGI 350 ORANG (14 ANGKATAN).
42. MASIH TINGGINYA GANGGUAN HUTAN DAN PERAMBAHAN HUTAN.
43. BELUM OPTIMALNYA KONSERVASI HUTAN DAN LAHAN SERTA RENDAHNYA PENDAPATAN MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN.

### **C. BIDANG KEUANGAN**

DARI PEMBAHASAN BERSAMA MITRA TERKAIT DIPEROLEH GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. DPRD PROVINSI JAWA BARAT MEMBERIKAN APRESIASI BAHWA SECARA KESELURUHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 YANG TERDIRI DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH BERHASIL DIREALISASIKAN MELEBIHI TARGET YANG DITENTUKAN. REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN TINGKAT CAPAIANNYA DI ATAS 100% YAITU 105,40%. BERKAITAN DENGAN SEKTOR YANG BELUM TERCAPAI, AGAR MENDAPATKAN PERHATIAN.
2. MASIH RENDAH KESADARAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA TEPAT WAKTU SERTA PEMAHAMAN TERHADAP KETENTUAN PEMBERLAKUAN PAJAK PROGRESIF.
3. BELUM ADA STANDARISASI KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN PERPAJAKKAN SESUAI KEBUTUHAN DAN PERUBAHAN REGULASI DI BEBERAPA CPDP/SAMSAT.
4. DALAM HAL RETRIBUSI DAERAH, BELUM OPTIMALNYA UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI, PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN RETRIBUSI YANG BELUM OPTIMAL, MASIH BELUM OPTIMALNYA KUALITAS APARATUR PENGELOLA RETRIBUSI, TINGKAT KEPATUHAN WAJIB RETRIBUSI YANG PERLU TERUS DITINGKATKAN.
5. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, BELUM OPTIMALNYA PERUSAHAAN DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIP PRINSIP: PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).
6. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, BELUM OPTIMALNYA UPAYA INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI, KUALITAS APARATUR PENGELOLA SERTA KETERSEDIAAN PERANGKAT HUKUM DALAM PENGELOLAAN LAIN LAIN PAD YANG SAH MASIH BELUM SEPENUHNYA LENGKAP, TERMASUK DALAM SYSTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASANNYA.
7. DANA PERIMBANGAN :
  - a. PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PUSAT (PBB, PPH PASAL 21 DAN PPH PASAL 25/29 WP OPDN) MASIH BELUM OPTIMAI KARENA BELUM DITUNJANG KEAKURATAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK YANG HARUS DITINGKATKAN;
  - b. BELUM OPTIMALNYA DATA POTENSI SUMBER DAYA ALAM YANG ADA DI KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DANA PERIMBANGAN;

- c. MASIH TERJADINYA KETERLAMBATAN PEMERINTAH DAERAH PENGHASIL MIGAS DALAM MENYAMPAIKAN PERHITUNGAN, MONITORING DATA PRODUKSI DAN LIFTING MIGAS SEHINGGA BERPENGAMH RERHADAP TINGKAT PENERIMAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM;
  - d. DALAM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL DARI CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) MASIH DIHADAPKAN PADA PERMASALAHAN KETIDAK SELARASAN PROGRAM PENGGUNAAN DBH DI PUSAT DAN DAERAH, SESUAI ROADMAP KEGIATAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
8. MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR UNTUK MENANAMKAN MODALNYA DI JAWA BARAT SEHINGGA BERPENGAMH PADA KURANGNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN DAERAH.
  9. KINERJA PEMPROV DIBIDANG BELANJA DAERAH TIDAK TEREALISASIKAN SESUAI DENGAN TARGET, YAITU SEBESAR 86,35%.
  10. BERKAITAN DENGAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD, BELUM SEBANDING DENGAN DEVIDEN YANG DITERIMA OLEH PEMPROV JABAR.

#### **D. BIDANG PEMBANGUNAN**

DARI PEMBAHASAN BERSAMA MITRA TERKAIT DIPEROLEH GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. APRESIASI TERHADAP PENCAPAIAN KEMANTAPAN JALAN SEBESAR 97,68%, PROGRAM JABAR CAANG DIMANA TARGET RASIO ELEKTRIFIKASI RUMAH TANGGA SEBESAR 83,77%, PENCAPAIAN STATUS MUTU SUNGAI UTAMA DAN WADUK BESAR DENGAN TINGKAT SUNGAI SEDANG SEBESAR 13,4%, TINGKAT KONDISI BAIK JARINGAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI DAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM SEBESAR 63% MENCAPI TARGET YANG DITETAPKAN.
2. TPPAS LEGOK NANGKA DAN NAMBO BELUM DAPAT DIGUNAKAN SEMENTARA TPA SARIMUKTI AKAN SEGERA BERAKHIR.
3. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN VENUE PON XIX UNTUK BEBERAPA CABANG OLAHRAGA (CABOR) PERSIAPANNYA BELUM OPTIMAL.
4. PEMBEBASAN LAHAN BANDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT DI KECAMATAN KERTAJATI JAWA BARAT BELUM OPTIMAL DAN MASIH BANYAK HAMBATAN.
5. KEGIATAN PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API CIBUNGUR-TANJUNGRASA BELUM FOKUS DAN MASIH ADA PERMASALAHAN.
6. KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITAS LLJ DI JAWA BARAT MASIH TERDAPAT HAMBATAN SEHINGGA TIDAK CUKUP WAKTU DAN MENGALAMI GAGAL LELANG.
7. MASIH ADANYA PERMASALAHAN DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FLY OVER KOPO.

8. PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR SELATAN SUKABUMI BELUM BISA DILAKSANAKAN DAN DIALIHKAN KE TAHUN 2015.
9. TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA KEGIATAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SUNGAI CISADEA-CIBARENO, AKIBAT GAGALNYA 2 KALI PROSES LELANG PADA PAKET PEKERJAAN DI SUNGAI CISUDA DAN SUNGAI CIRENGHAS DI KABUPATEN SUKABUMI.
10. KEGIATAN MANAJEMEN DAS WILAYAH SUNGAI CIWULAN-CILAKI, AKIBAT BELUM DEFINITIFNYA KEANGGOTAAN TKPSDA WS. CIWULAN-CILAKI SEHINGGA RAPAT SIDANG DAN RAPAT KOMISI TKPSDA BELUM DAPAT DILAKSANAKAN.
11. KEGIATAN WISMP-2 DAN PENDAMPING HIBAH APBD DINAS PSDA PROVINSI JAWA BARAT, TERDAPAT SUB KEGIATAN YAITU OP PARTISIPATIF YANG TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA TERLAMBATNYA PERSETUJUAN ANNUAL WORK PLAN (AWP) OLEH NATIONAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (NPIU) IRIGASI (PUSAT).
12. TERDAPATNYA DEGRADASI TERHADAP SUMBER DAYA ALAM (ILLEGAL MINING, ILEGAL LOGING DAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN), PENATAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT, MENINGKATNYA PENINGKATAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN.
13. TERDAPATNYA INKONSISTENSI PEMANFAATAN RUANG YANG BELUM SEJALAN DAN BELUM ADANYA RDTR.
14. KETERBATASAN ALOKASI ANGGARAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN RENDAHNYA KEPEDULIAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PPLH MENGAKIBATKAN MASIH ADANYA POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN.

#### **E. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

DARI PEMBAHASAN BERSAMA MITRA TERKAIT DIPEROLEH GAMBARAN SEBAGAI BERIKUT:

1. REALISASI INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2014 MENCAPAI 83,36 POIN, ATAU NAIK 1,05 POIN DIBANDING CAPAIAN TAHUN 2013 (82,31 POIN), NAMUN DEMIKIAN INDEKS PENDIDIKAN INI MASIH LEBIH RENDAH DARI TARGET RKPD MAUPUN RPJMD SEBESAR 84,65.
2. INDEKS KESEHATAN TAHUN 2014 MENCAPAI 74,01 POIN, MENINGKAT 1,41 POIN DIBANDING CAPAIAN TAHUN 2013 (72,6 POIN). NAMUN DEMIKIAN INDEKS KESEHATANPUN MASIH LEBIH RENDAH DARI TARGET RKPD MAUPUN RPJMD SEBESAR 75,6.
3. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) YANG SANGAT DIRASAKAN MANFAATNYA DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI DAN DAYA TAMPUNG SISWA, SEBAGIANNYA TIDAK BISA DICAIRKAN KARENA ALASAN TEKNIS, PADAHAL SEKOLAH-SEKOLAH YANG ADA DALAM DAFTAR CPCL-NYA TELAH DIVERIFIKASI DAN TELAH MENGIKUTI BINTEK.

4. MASIH DITEMUKAN ADANYA KECAMATAN DI KABUPATEN/KOTA YANG BELUM MEMILIKI SMA/SMK.
5. PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT MERUPAKAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI YANG BAIK, NAMUN DALAM PELAKSANAANNYA MASIH KURANG TERSOSIALISASI TERUTAMA PROSEDUR DAN MEKANISME UNTUK MENGAksesNYA.
6. UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENDORONG HADIRNYA RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL JAWA BARAT (6 RS) TELAH MAMPU MENAIKKAN INDEKS KESEHATAN SEBESAR 1,5 POIN DARI TAHUN 2013. NAMUN 6 RS TERSEBUT BELUM MAMPU MENAMPUNG PASIEN-PASIEN MASYARAKAT JAWA BARAT.
7. BEBERAPA KEGIATAN DI RSUD AL-IHSAN TIDAK TEREALISIR KARENA FAKTOR EKSTERNAL.
8. DITEMUKAN ADANYA ALOKASI ANGGARAN SEKITAR 9 MILYAR UNTUK RS. CIBINONG KABUPATEN BOGOR YANG TIDAK BISA DIREALISASIKAN KARENA PENEMPATAN ANGGARAN YANG TIDAK TEPAT.
9. MASIH BELUM EFEKTIFNYA BANTUAN JPKM KE KABUPATEN/KOTA KARENA BERBEDANYA KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PROVINSI DALAM HAL PEMBAYARAN PREMI.
10. SARANA DAN PRASARANA DI RS PARU SIDAWANGI CIREBON SUDAH MEMADAI, NAMUN BELUM MEMILIK DOKTER SPESIALIS PARU.
11. BANTUAN HIBAH UNTUK PESANTREN YANG HANYA BISA TEREALISASI SEBANYAK 761 KOBONG/ASRAMA DARI 1000 YANG SUDAH DIANGGARKAN KARENA KENDALA TEKNIS. PADAHAL 239 PESANTREN YANG BELUM TEREALISASIKAN SUDAH MENGIKUTI BINTEK.
12. BANTUAN HIBAH UNTUK INSENTIF GURU MADRASAH DINIYAH BELUM MEMADAI BAIK BESARAN MAUPUN JUMLAH PENERIMANYA.
13. BELUM TERANGGARKANNYA DANA UNTUK PEMBANGUNAN TKI CENTRE LEUWI PANJANG DAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DISNAKERTRANS, PADAHAL DED-NYA SUDAH SELESAI. SEMENTARA ITU PERMINTAAN UNTUK PEMAGANGAN TKI KE LUAR NEGERI, KHUSUSNYA JEPANG, KOREA DAN PERMINTAN PELATIHAN TENAGA KERJA KELUAR NEGERI SANGAT BESAR.
14. MOBIL TRAINING UNIT (MTU) YANG SANGAT DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PELATIHAN KETERAMPILAN DI DAERAH-DAERAH, JUMLAHNYA MASIH TERBATAS.
15. BELUM SELESAINYA MASALAH PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BAPUSIPDA.
16. PEMBINAAN KEPUSTAKAAN UNTUK DESA-DESA, PESANTREN, DAN INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH DIRASAKAN MASIH KURANG.
17. PROGRAM PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT BELUM TERPROGRAM SECARA RUTIN.

18. MASIH KURANGNYA TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DI BIDANG PEREMPUAN DAN KB YANG DIBENTUK OLEH PROVINSI.
19. GEDUNG REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK JALANAN BELUM MENDAPAT ANGGARAN MEMADAI.
20. BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN PRESTASI ATLET JAWA BARAT DI SETIAP CABOR YANG AKAN DIPERTANDINGKAN DI PON XIX TAHUN 2016.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **A. KESIMPULAN**

BANYAKNYA PENGHARGAAN DAN PENILAIAN TINGKAT NASIONAL PADA TAHUN 2014 YANG DITERIMA PROVINSI JAWA BARAT MENGINDIKASIKAN PRESTASI PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DI JAWA BARAT. DALAM PELAKSANAANNYA MEMANG MASIH ADA BEBERAPA PERMASALAHAN YANG BELUM TUNTAS, SEPERTI PENATAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, PROSES PEMEBEBASAN LAHAN PADA BEBERAPA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN, OPTIMALISASI DANA BERGULIR UNTUK PERMODALAN KUMKM SERTA PENANGANAN BERBAGAI MASALAH PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL, DAN PEREKONOMIAN RAKYAT. SEMUA ITU HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENUNTASAN PROGRAM KEGIATAN SELANJUTNYA.

SECARA UMUM LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 TELAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG LENGKAP, HAL ITU BISA DILIHAT DARI INDIKATOR KESEJAHTERAAN. SECARA UMUM GUBERNUR TELAH MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA BARAT, KENDATI DI SANA PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TIDAK KALAH PENTINGNYA DENGAN PERAN GUBERNUR.

DARI 3 ASPEK YAKNI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH, SEBAGIAN BESAR INDIKATOR MEMPERLIHATKAN NILAI POSITIF.

KINERJA KEUANGAN DAERAH RELATIF BAIK TERUTAMA PADA ASPEK PENDAPATAN DAERAH, SEMENTARA UNTUK ASPEK BELANJA DAERAH DAPAT DINILAI CUKUP.

## **B. REKOMENDASI**

DARI HASIL PEMBAHASAN, MAKA MEREKOMENDASIKAN KEPADA SAUDARA GUBERNUR JAWA BARAT AGAR :

1. MESKIPUN INDEKS KESEHATAN DAN INDEKS PENDIDIKAN MENINGKAT DIBANDING TAHUN 2013, NAMUN CAPAIAN DI TAHUN 2014 BELUM MEMENUHI TARGET SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM RPJMD PEMPROV JABAR. OLEH KARENA ITU, GUBERNUR AGAR LEBIH FOKUS UNTUK MENGELOLA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN DI MASING-MASING SKPD YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENINGKATAN IPM.
2. PENINGKATAN PENDAPATAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2014 MENCAPAI TARGET YANG CUKUP SIGNIFIKAN. NAMUN, PENINGKATAN TERSEBUT MASIH TERBUKA UNTUK LEBIH DITINGKATKAN MENINGGAT BERBAGAI POTENSI YANG ADA. OLEH KARENANYA, PANSUS MEREKOMENDASIKAN UNTUK DILAKUKANNYA UPAYA-UPAYA, BAIK INTENSIFIKASI MAUPUN EKSTENSIFIKASI.
3. DARI SISI BELANJA, TERUTAMA UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK, MEMANG MASIH TERDAPAT BEBERAPA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG SERAPAN ANGGARANNYA MASIH CUKUP RENDAH, BAIK KARENA FAKTOR REGULASI, GAGAL LELANG, WAKTU YANG TIDAK MENCUKUPI, MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL. OLEH KARENA ITU, MEREKOMENDASIKAN AGAR PROGRAM-PROGRAM YANG BELUM TERSELESAIKAN TERUTAMA YANG STRATEGIS SEMISAL PEMBANGUNAN BERBAGAI SARANA DAN PRASARANA PON XIX, PEMBANGUNAN BIJB KERTAJATI, TOL CISUMDAWU, INTERCHANGE JALAN LAYANG, PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PENEGERIAN PTS YANG BELUM SELESAI, PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-IHSAN DAN RSUD REGIONAL, TPPAS LEGOK NANGKA DAN NAMBO, BADIKLATDA, WADUK JATIGEDE, PEMBERDAYAAN BUMD, RUTILAHU DAN LAIN-LAIN, AGAR DAPAT SEGERA DISELESAIKAN DENGAN PENDEKATAN YANG TERINTEGRASI.
4. BERKAITAN DENGAN MASIH TINGGINYA MASALAH-MASALAH SOSIAL SEPERTI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS), TRAFFICKING, PENYALAHGUNAAN NARKOBA, PERLU SEGERA DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DAN KONKRET UNTUK KETAHANAN KELUARGA.
5. PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN DAN PENGUATAN SDM DI BERBAGAI SKPD TERKAIT DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN BERBAGAI PERATURAN DAERAH YANG BARU.

6. PERLU DILAKUKAN PENGUATAN DI BIDANG HUKUM BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERDA, PERATURAN KEPALA DAERAH (PERKADA), SOSIALISASI, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERUBAHAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN YANG ADA, PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN BAIK DIKALANGAN BIROKRAT MAUPUN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM SERTA PENYELESAIAN PERSOALAN-PERSOALAN HUKUM, BAIK LITIGASI MAUPUN NON LITIGASI SERTA KETERTIBAN DAN KEAMANAN MELALUI SOSIALISASI BERBAGAI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA AGAR DIPAHAMI DAN DITAATI OLEH SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN.
7. BERKENAAN DENGAN INVENTARISASI, PENATAAN, PENGAMANAN, SERTIFIKASI, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET, BAIK ASET YANG DIPISAHKAN MAUPUN ASET YANG TIDAK DIPISAHKAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN DAN PENYELESAIAN SERIUS SESEGERA MUNGKIN.
8. BERKENAAN DENGAN PERAN DAN FUNGSI BKPP SELAMA INI YANG MASIH BELUM OPTIMAL, PERLU DITINGKATKAN PERAN DALAM UPAYA MELAKUKAN TEROBOSAN TERUTAMA BERKENAAN DENGAN TEMATIK KEWILAYAHAN YANG MENJADI PROGRAM DI MASING-MASING BKPP SEHINGGA LEBIH JELAS DAN FOKUS.
9. BERKENAAN DENGAN SEMAKIN MENINGKATNYA PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA YANG AKAN DIBIYAI BAIK OLEH PEMPROV MAUPUN PEMERINTAH PUSAT SEIRING PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, MAKA DIPERLUKAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPALA DESA BESERTA APARATURNYA DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA. OLEH KARENA ITU PEMPROV HARUS SENANTIASA MELAKUKAN PEMBERDAYAAN, BIMBINGAN DAN PELATIHAN.
10. SEHUBUNGAN DENGAN PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BELUM MEMBERIKAN DEVIDEN YANG MEMADAI OLEH KARENA PERLU ADA PENINGKATAN KINERJA KE ARAH TERSEBUT. ADAPUN TERHADAP BUMD YANG KINERJANYA BELUM OPTIMAL DAN DALAM PERKEMBANGAN SECARA KELEMBAGAANNYA BELUM MENUNJUKAN HASIL YANG MEMUASKAN, PERLU DIEVALUASI DAN DISIKAPI LEBIH SERIUS.
11. BERKENAAN DENGAN PEMANFAATAN CSR BUMD LEBIH DIARAHKAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT.

12. MEMPERHATIKAN ANTUSIASME MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KREDIT CINTA RAKYAT (KCR) TETAPI TINGKAT NPL PADA PROGRAM TERSEBUT SANGAT TINGGI, OLEH KARENA ITU PERLU DIPERMUDAH DAN DIKAJI KEMBALI PERSYARATAN PEMINJAMANNYA.
13. PERLU PENGUATAN TERHADAP PETANI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TUKAR PETANI (NTP), ANTARA LAIN MELALUI AKSESIBILITAS PADA BANTUAN PERMODALAN SEHINGGA AKAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI.
14. BERKENAAN DENGAN KETAHANAN PANGAN PRODUK PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN PEMPROV JABAR MAKA DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG MEMPERMUDAH RAKYAT DALAM PERLINDUNGAN LAHAN, PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI, BENIH YANG BERKUALITAS, PPL, SERTA SARANA DAN PRASARANA, DAN JUGA YANG LEBIH PENTING YAITU PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERSAINGAN GLOBAL.
15. MENINGGAT JAWA BARAT MERUPAKAN WILAYAH YANG RAWAN BENCANA ALAM MAUPUN BENCANA YANG DIAKIBATKAN KEGAGALAN TEKNOLOGI MAKA PEMPROV JABAR PERLU MENGUPAYAKAN PENINGKATAN MITIGASI BENCANA.
16. DALAM MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DIPERLUKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGAWASAN SESUAI DENGAN MEKANISME DAN KETENTUAN YANG ADA. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAS PERLU MENJADI PERHATIAN, PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR TERMASUK WADUK JATI GEDE DIHARAPKAN MEMBERIKAN MANFAAT, PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU, TOL CIAWI SUKABUMI TERMASUK IDE MEMBANGUN JALUR PUNCAK DUA BOGOR CIANJUR WAJIB DILANJUTKAN.
17. SEHUBUNGAN DENGAN MAKIN BANYAKNYA PORNOGRAFI, PORNOAKSI, KEKERASAN, MISTIS YANG TIDAK MENDIDIK DAN TIDAK SESUAI DENGAN NORMA AGAMA, BUDAYA DAN HUKUM, TERUTAMA PENYIARAN DI RADIO, DAN TELEVISI, MAKA DIPERLUKAN PENINGKATAN PERAN KPID YANG MAKSIMAL.
18. BERKENAAN DENGAN HARAPAN JAWA BARAT KAHJI (SUKSES PENYELENGGARAAN, SUKSES PRESTASI, SUKSES EKONOMI DAN SUKSES ADMINISTRASI) DI BIDANG OLAH RAGA, MAKA KONI SEBAGAI INDUK KEOLAHRAGAAN DIHARAPKAN TETAP FOKUS KEPADA PENINGKATAN PRESTASI ATLET SELURUH CABANG OLAH RAGA.

19. BERKAITAN PROVINSI JAWA BARAT KAYA DENGAN POTENSI KELAUTAN BAIK UNTUK PARIWISATA, MAUPUN PEMANFAATAN POTENSI HASIL LAUT, MAKA DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN HASIL LAUT, BAIK YANG MENYANGKUT TEKNOLOGI, SUMBER DANA MAUPUN SUMBER DAYA TERMASUK PERLINDUNGAN KEAMANAN WILAYAH LAUT KITA.
20. DIPERLUKAN KESERIOUSAN PEMPROV JABAR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI SERTA PERLINDUNGAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL, TERMASUK PENINGGALAN-PENINGGALAN SITUS, ANTARA LAIN SITUS GUNUNG PADANG, SITUS GUNUNG JATI CIREBON, SITUS JATIGEDE DAN GEDUNG-GEDUNG BERSEJARAH.
21. DALAM UPAYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA LINGKUNGAN HIDUP (PRO ENVIRONMENT), PEMERINTAH PROV JABAR MASIH KURANG MEMADAI DALAM MEMPERHATIKAN PERSOALAN-PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP, ANTARA LAIN ALIH FUNGSI LAHAN YANG TIDAK TERKENDALI (PEMBANGUNAN RUMAH DI TEMPAT SERAPAN AIR), PENCEMARAN SUNGAI OLEH LIMBAH INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA, PENCEMARAN UDARA OLEH GAS KARBON DARI KENDARAAN, ASAP ROKOK, PENGGUNAAN INSEKTISIDA YANG BERLEBIHAN TERMASUK BUANGAN ASAP INDUSTRI, OLEH KARENNYA DIPERLUKAN LANGKAH TEGAS, KONKRIT, SERIUS, DAN TERPADU DALAM UPAYA MENGATASI PENCEMARAN TERSEBUT DAN SECARA KHUSUS MENERTIBKAN DAN MEMULIHKAN KAWASAN BANDUNG UTARA DAN BOPUNJUR, TERMASUK MEMBANGUN JALUR PUNCAK DUA BOGOR CIANJUR.
22. BERKENAAN DENGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI DI JAWA BARAT, BAIK DARAT, LAUT DAN UDARA, DIPERLUKAN INTEGRASI KEBIJAKAN ANTARA PEMPROV DENGAN KABUPATEN KOTA, PEMPROV JABAR DENGAN PEMPROV YANG LAIN YANG BERBATASAN, SERTA ANTARA PEMPROV DENGAN PEMERINTAH PUSAT.
23. DIHARAPKAN PEMERINTAH PROV JABAR TETAP KONSISTEN MENGAWAL DAN MENINDAKLANJUTI PENGEMBANGAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) YANG SUDAH MENJADI AGENDA NASIONAL.
24. BERKAITAN DENGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA, INDEKS PERSEPSI KORUPSI SERTA INDEKS KEBAHAGIAAN YANG MENJADI BAGIAN DARI TOLOK UKUR PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TENTU TIDAK DAPAT DIABAIKAN BEGITU SAJA, PEMERINTAH DAERAH HARUS LEBIH SERIUS LAGI MEMPERHATIKAN HAL TERSEBUT.

25. PEMBERIAN IZIN BAGI PENANAM MODAL DI JAWA BARAT HARUS DIARAHKAN ANTARA LAIN BISA MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PEKERJA LOKAL, TERJAMINYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR YANG ADA SERTA TERPELIHARANYA LINGKUNGAN SEKITAR.
26. DIRIKAN BALAI LATIHAN KERJA SERTA LEMBAGA AKREDITASI KEAHLIAN DALAM BERBAGAI BIDANG KEAHLIAN UNTUK MENSUKSESKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
27. PERLU ADANYA PENAMBAHAN PROGRAM REHAB DAN RUANG KELAS BARU (RKB) BAGI SMP/TSANAWIYAH/SMA/SMK/MA SERTA PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT TERKAIT KUALITAS BANGUNAN RKB.
28. PERLU ADANYA SOSIALISASI UNTUK BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI.
29. DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PERLU DITINGKATKAN.
30. PEMPROV UNTUK TERUS BERUPAYA MENGEMBANGKAN PUSKESMAS DAN PEMBANGUNAN PONED SEHINGGA BISA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN KEGIATAN PONED.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI